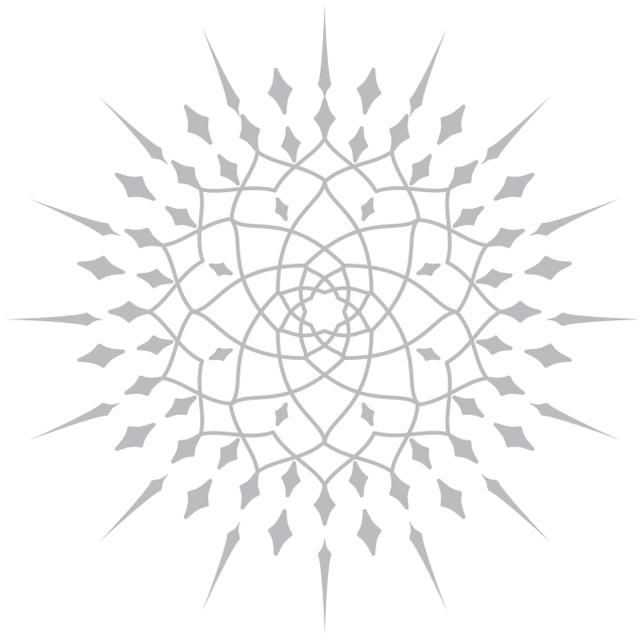


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Jurnal

Pendidikan Islam



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

Ketua Penyunting

Imam Machali

Anggota Penyunting

Sukiman

Sri Sumarni

Sabarudin

Karwadi

Na'imah

Zainal Arifin

Andi Prastowo

Sigit Prasetyo

Rohinah

Tata Usaha

Siti Latifah

Sofa Faizin

Distribusi

Maryono

Marwanto

Jurnal Pendidikan Islam (JPI) terbit dua kali dalam setahun oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima naskah seputar Pendidikan Islam dalam berbagai perspektif sesuai dengan visi, misi dan ketentuan redaksi.

Alamat Redaksi:

Jurnal Pendidikan Islam (JPI)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lt. III Ruang 315

UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia

Telp. +62-274-513056

E-mail: jurnaljpi@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INKLUSIF-MULTIKULTURAL Mahmud Arif	1
BASIS EPISTEMOLOGI DALAM PENDIDIKAN ISLAM Imam Hanafi	19
FENOMENA PENDIDIKAN ELITIS DALAM SEKOLAH/MADRASAH UNGGULAN BERSTANDAR INTERNASIONAL Andi Prastowo	31
URGENSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL DI SEKOLAH Erlan Muliadi	55
KETUNTASAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PAI MELALUI METODE KISAH Pandi Kuswoyo	69
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL-RELIGIUS UNTUK MEWUJUD- KAN KARAKTER PESERTA DIDIK YANG HUMANIS-RELIGIUS Zainal Arifin	89
PARADIGMA PENDIDIKAN AGAMA INTEGRATIF-TRANSFORMATIF Ibnu Rusydi	105
DEKONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SUBSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Suyatno	121

DEKONSTRUKSI PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SUBSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Suyatno

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

e-mail: *broery_jis@yahoo.co.id*

Abstract

The dualism of the nationally educational system has become the object of debate in various forums and educational seminars. The dualism of the educational system is the continuity of history; both in history of the Muslims in particular and the history of Indonesian people in general. In addition, the discourse of dualism also gained back the education system due to political turmoil ideology. Whatever the reason, the dualism has some nationally negative impact to educational institutions in Indonesia mostly in Islamic educational institutions. Therefore, it was the time that education in Indonesia must be under the policy of the ministry of education to make one-policy of educational system.

Keywords: *The dualism of nationally educational system, One policy of educational*

Abstrak

Dualisme sistem pendidikan nasional telah menjadi objek perdebatan di berbagai forum dan seminar-seminar pendidikan. Dualisme sistem pendidikan merupakan kesinambungan sejarah, baik sejarah umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Di samping itu, wacana dualisme sistem pendidikan juga menguat kembali akibat gejolak politik nasional yang bermuatan ideologi tertentu. Apapun alasannya, dualisme banyak berdampak negatif terhadap lembaga pendidikan di Indonesia terlebih lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu sudah saatnya pendidikan di Indonesia berada di bawah satu payung kementerian sehingga menjadi sistem pendidikan satu atap.

Kata kunci: Dualisme sistem pendidikan nasional, Pendidikan Satu Atap

Pendahuluan

Perdebatan mengenai wacana dikotomi pendidikan hampir tidak pernah selesai. Dualisme Sistem Pendidikan Nasional dari dulu telah menjadi objek perdebatan di berbagai forum dan seminar-seminar pendidikan. Para pakar dan praktisi pendidikan nasional, terutama dari kalangan umat Islam, terus memperdebatkan seputar dikotomi pendidikan nasional. Karena, sejatinya, dualisme pendidikan nasional justru semakin memperkeruh kondisi pendidikan saat ini.

Dualisme sistem pendidikan telah membelah wajah pendidikan nasional menjadi dua, pertama, pendidikan umum yang memiliki karakter khas dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, pendidikan agama yang juga memiliki karakter khas dan berada di bawah naungan Kementerian Agama.¹ Dua wajah pendidikan inilah yang telah mewarnai pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga saat ini.

Dikotomi sistem pendidikan merupakan kesinambungan sejarah, baik sejarah umat Islam pada khususnya maupun sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Di samping itu, wacana dikotomi pendidikan juga menguat kembali akibat gejolak politik nasional yang bermuatan ideologi tertentu. Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga kini telah terjadi perseteruan politik antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis religious (Islam). Kedua kelompok yang bersebrangan visi ini saling berebut pengaruh untuk menaklukkan dan sekaligus menguasai sistem konstitusi Negara. Akibatnya masing-masing berusaha melegitimasi ideologi tertentu, malah kalau perlu secara konfrontatif dengan melakukan proses pelembagaan formal.² Dari proses inilah lahir dualisme sistem pendidikan, di satu sisi pendidikan Islam berada di bawah payung Kementerian Agama, di sisi yang lain pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.³

1 Usaha untuk memadukan antara kedua sistem tersebut sebenarnya telah lama didengungkan, dengan jalan memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan modern ke dalam sistem pendidikan tradisional, dan memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah-sekolah modern. Dengan demikian diharapkan sistem pendidikan tradisional akan berkembang secara berangsur-angsur mengarah ke sistem pendidikan modern. Dan inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh para pemikir pembaharuan pendidikan Islam, yang berorientasi pada ajaran Islam yang murni, sebagaimana dipelopori oleh al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Namun demikian, sampai sekarang dualism sistem pendidikan ini masih menjadi permasalahan utama di Negara-negara muslim, termasuk indonesia. Baca Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), hlm. 125

2 Muarif, *Liberalisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008), hlm. 28

3 Sebagai pembanding baca Noorhaidi Hasan, "Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and New Trend in Formal Education Institution in Indonesia" *Artikel Online* di S. Rajartanam School of International Studies Singapore, Februari 2011, hlm. 4-5

Apapun latar belakang dari dualisme sistem pendidikan ini yang jelas memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap perkembangan pendidikan di tanah air. Oleh karenanya perlu segera dicarikan solusinya. Tulisan ini hendak mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Diawali dengan menelusuri akar historis dualisme sistem pendidikan, penulis menawarkan solusi dari sudut pandang epistemologi keilmuan maupun dari segi kelembagaan.

Menelusuri Akar Sejarah Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia

Munculnya dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kemunduran dunia Islam yang didominasi oleh pola pengembangan keilmuan agama yang spesifik-parsialistik dan juga pengaruh penjajahan Barat. Oleh sebab itu, sistem pendidikan di Indonesia di satu sisi masih mewarisi pola pendidikan Islam (tradisional) dan di satu sisi mewarisi sistem penjajah (Barat). Karel A. Steenbrink mendapati bahwa asal usul sistem pendidikan yang dualistik di Indonesia telah bermula sejak zaman kolonial Belanda hingga berlanjut ke zaman kemerdekaan. Penolakan politik pemerintah kolonial penjajah untuk menyesuaikan diri dan menggabungkan sistem pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren yang telah ada sebelumnya menjadi dasar untuk mengembangkan sekolah-sekolah umum menjadi salah satu sebab wujudnya sekolah-sekolah yang menggunakan sistem pendidikan kolonial.⁴

Sejak masuknya Islam ke Indonesia, pendidikan Islam telah berlangsung dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara muballig (pendidik) dengan peserta didiknya. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam pertama yang muncul di samping rumah tempat kediaman para ulama maupun muballig.⁵ Setelah itu muncullah lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren, dayah dan surau. Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu agama yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Pendidikan Islam yang sedemikian rupa sangat kontras dengan pendidikan Barat yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Pendidikan kolonial ini bersifat sekuler, tidak mengajarkan sama sekali ilmu agama di sekolah pemerintah. Begitu pula sebaliknya, pendidikan Islam di masa itu tidak mengajarkan sama sekali ilmu-ilmu umum. Kenyataan ini membuat terpolanya pendidikan di Indonesia saat ini dengan dua sistem yang saling kontras tersebut.⁶

4 Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES The Columbia Encyclopedia (1963) NY & London: Colombia University Press, 1986). hlm. 3

5 Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1979), hlm. 60-62

6 Noorhaidi Hasan, "Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and New Trend in Formal Education Institution in Indonesia" *Artikel Online* di S. Rajartanam School of International Studies Singapore, Februari 2011, hlm. 4-5

Steenbrink dalam tulisannya mengutip pernyataan J.A. Van der Chijs, seorang inspektur pendidikan pribumi pertama yang dilantik dalam kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda, yang menyatakan bahwa "Walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselengi dengan kebiasaan peribumi, namun saya tidak menerimanya kerana kebiasaan tersebut terlalu jelek, sehingga tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi." Para sarjana kolonial pada masa itu menyatakan bahwa tradisi didaktik pendidikan pribumi seperti membaca teks arab dan penggunaan kaedah hafalan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan umum.⁷

Maka didirikanlah sejumlah sekolah Kristen di Minahasa Sulawesi dan Maluku yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah dan manajemenya dilaksanakan oleh para zending kristian. Sama seperti lembaga pendidikan Islam, sekolah ini pada awalnya hampir seratus persen memusatkan diri pada pendidikan agama kristian. Walau guru-guru setempat yang mendapatkan pendidikan dari lembaga tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin agama bagi masyarakat setempat, namun bagi penjajah kolonial sekolah ini lebih mudah penggabungannya untuk memasukkan sekolah tersebut ke dalam sistem sekolah umum berbanding lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Hal itu antara lain karena disebabkan murid di sekolah umum sudah terbiasa dengan tulisan romawi dibandingkan dengan tulisan dan Bahasa Arab. Faktor lain juga adalah disebabkan oleh adanya hubungan organisasi yang bersifat kepentingan ideologis antara pemerintah kolonial dan zending dibandingkan dengan Islam.

Dalam perkembangan berikutnya sekolah zending kristian ini masuk ke dalam sistem pendidikan umum gubernemen dan diberikan dasar-dasar ilmu hitung dan ilmu-ilmu dasar yang lain bagi memenuhi keperluan pegawai gubernemen penjajah.⁸ Pada pergantian abad ke 20, beberapa tokoh kolonial penjajah berfikir untuk mencari kemungkinan melibatkan pendidikan Islam bagi pengembangan sistem pendidikan umum. Hal itu disebabkan kerana pendidikan Islam dibiayai oleh rakyat sendiri dan dengan demikian pendidikan umum akan dapat dilaksanakan dengan penggunaan biaya yang lebih murah. Akan tetapi karena alasan politik, penggabungan sistem tersebut tidak terlaksana sehingga akhirnya konsekuensi logisnya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri persoalan Islam. Pemerintah kolonial beranggapan bahwa tidak ada keuntungan yang dapat diraih dari lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, didirikanlah apa yang disebut dengan sekolah desa, sebuah lembaga pendidikan sederhana yang membuka jalan bagi wujudnya pendidikan

7 Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, hlm. 3

8 Achmadi, dalam Muntholi'ah, Abdul Rahman, dan M. Rizka Chamami (Editor), *Guru Besar Bicara Mengembangkan Keilmuan Pendidikan Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2010), hlm.110

umum untuk semua masyarakat. Sekolah Islam semenjak itu mengambil jalan sendiri, lepas dari gubernemen, tetap berpegang pada tradisinya sendiri namun terbuka untuk perubahan dalam tradisinya tersebut.

Demikianlah sejak permulaan abad 20 pendidikan Islam mulai mengembangkan satu model pendidikan sendiri yang berbeda dan terpisah dari sistem pendidikan Belanda maupun sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dari sini nampak, bahwa sistem pendidikan umum di Indonesia, bukanlah muncul akibat penyesuaiannya dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Sebaliknya sistem pendidikan Islam yang pada akhirnya lama kelamaan akan menyesuaikan diri dan masuk ke dalam sistem pendidikan umum.⁹

Kemunculan institusi madrasah pada paruh berikutnya yang dipelopori oleh beberapa ulama¹⁰ seperti Abdullah Ahmad, Zainuddin Labay el-Yunusi (1890-1924), KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari serta beberapa ulama dan tokoh sesudahnya yang tersebar di nusantara merupakan fenomena baru dalam transformasi pendidikan pada masa itu.¹¹ Selain karena faktor internal dan eksternal bangsa Indonesia juga diupayakan agar madrasah boleh menjadi penghubung wujudnya integrasi atau keterpaduan dua pola bentuk pendidikan (dualisme) yang berlawanan.

Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan madrasah awalnya diharapkan mampu menciptakan pelajar-pelajar yang mengetahui dan menguasai ilmu-ilmu agama sekaligus ilmu-ilmu umum. Justru itu, sistem madrasah yang pada awalnya didesain sebagai konvergensi atau penggabungan kurikulum pendidikan pondok dan sekolah umum yang sedikitnya hampir sama dengan kurikulum pesantren modern. Namun, pengembangan program pengkhususan tertentu yang memisahkan ilmu fardhu ain dan kifayah tanpa konsep yang jelas menyebabkan peranan madrasah dalam mengurangi terjadinya dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam semakin tidak nampak.¹² Di sisi lain, kegagalan sistem madrasah juga dapat dilihat dari fakta prestasi kebanyakan pelajarnya dalam bidang ilmu-ilmu agama masih tertinggal jauh berbanding pelajar pondok dan begitu juga pelajar dari pendidikan umum.

9 Bandingkan dengan Maksun, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm. 150-151

10 Baca Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES), 1982), hlm. 69

11 Amir Hamsyah WS, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam* (Malang: Ken Mutia, 1968), hlm. 70

12 Baca Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Agama, 2005), hlm. 63

Dalam pandangan Mahmud Yunus, perbedaan antara madrasah di satu sisi dan sekolah termasuk sekolah-sekolah umum peninggalan penjajah Belanda di sisi lain setelah masa kemerdekaan, memperjelas adanya dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia.¹³ Dualisme institusi pemerintah yang melakukan pembinaan pendidikan itu kemudian pada tataran teknis memberi pengaruh pada dualisme penyelenggaraan pendidikan, baik yang berkaitan dengan struktur kurikulum, penyediaan tenaga kependidikan (khususnya tenaga guru), maupun menyangkut pembiayaan pendidikan. Di satu sisi, ada lembaga-lembaga pendidikan agama, yaitu pesantren, madrasah, IAIN/UIN dan di sisi lain ada sekolah mulai dari tingkat dasar hingga universitas. Yang pertama berada di bawah struktur pengelolaan Kementerian Agama dan yang terakhir berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang berubah lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasca *reshuffle* kabinet tanggal 19 Oktober 2011).

Maksum melihat bahwa meskipun pada tahap perkembangan selanjutnya antara kedua lembaga kementerian ini terjadi interaksi dan saling melengkapi, tetapi nampaknya kecenderungan itu masih dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat politik dan juga karena adanya perubahan paradigma sebagian umat Islam dalam memahami dan melihat kerangka hubungan Islam dan negara.¹⁴ Terjadinya interaksi itu karena mendapat dorongan dari dua arah. Pertama, dorongan dari pemerintah khususnya pada masa orde baru yang mengeluarkan dan menetapkan beberapa aturan untuk mempersempit kesenjangan antara keduanya yang mewajibkan madrasah untuk mengajarkan pengetahuan umum dan pada masa yang sama mewajibkan sekolah umum untuk mengajarkan pengetahuan agama. Kedua, dorongan dari pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam sendiri untuk memberikan pengetahuan umum modern sebagai mata pelajaran tambahan. Ini sejalan dengan perubahan pandangan di kalangan Muslim yang mulai menyadari betapa pentingnya pengetahuan umum bagi kehidupan ini. Interaksi dan hubungan itu saling melengkapi dan mengalami perkembangan pesat pada abad ke-20.

Hal ini sejalan dengan semakin besarnya semangat untuk mentransformasikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di kalangan pemikir dan aktivis Muslim Indonesia, khususnya dari kalangan modernis. Sejak pengelolaan madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama, lembaga pendidikan ini secara berkelanjutan mengalami modernisasi, baik dari segi kurikulum, media pengajaran, tenaga pengajar, maupun fasilitas pendidikan pada umumnya. Mata pelajaran umum yang diberikan pun semakin besar porsinya.

13 Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1979), hlm 21

14 Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1999)

Madrasah mengalami perubahan yang cukup mendasar saat lahir Kepres No 34 tahun 1972, kemudian diperkuat dengan Inpres No 15 tahun 1974, dan secara operasional tertuang dalam SKB menteri agama, menteri P7K, dan menteri dalam negeri No 6 tahun 1975. Semua aturan itu menggariskan bahwa madrasah di semua jenjang mempunyai posisi yang sama dengan sekolah umum. Untuk itu kurikulum madrasah diharuskan memuat alokasi waktu 70 persen untuk mata pelajaran umum dan 30 persen untuk pelajaran agama.¹⁵ Kemudian pada 1984 dikeluarkan SKB menteri agama dan menteri pendidikan tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah. Di situ antara lain disinggung soal pengakuan kesetaraan mutu lulusan madrasah dengan sekolah umum. Pemerintah mengakomodasi madrasah sebagai salah satu model pembelajaran di Indonesia sekaligus mengakhiri ketidakpastian posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Dalam tataran praksis, madrasah gagasan pemerintah ini diproyeksikan sebagai sekolah umum berciri khas agama di mana kandungan ilmu agama hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan kurikulum yang ada. Kebijakan ini terkait realitas bahwa sistem pendidikan madrasah yang berkembang di pesantren dengan capaian yang sangat spesifik dinilai tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dan tuntutan zaman yang semakin kompleks.

Masuknya sistem madrasah yang digagas pemerintah di samping sistem pendidikan pesantren yang sudah ada, merupakan langkah menciptakan ragam pendidikan di Indonesia. Pemerintah menginginkan terjadi proses Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Sehingga Pemerintah mempunyai legitimasi dalam pengintegrasian ilmu agama dan iptek yang selama ini terkotak-kotak ke dalam ilmu umum. Tujuannya, *out put* yang dihasilkan madrasah adalah pelajar yang religius sekaligus handal di bidang ekonomi riil, teknologi, dan informasi. Secara tidak langsung, madrasah didesain sebagai konvergensi kurikulum pendidikan pesantren dan sekolah model Barat. Namun jika dilihat dari sudut aspek lain, adanya realitas semacam ini bukanlah berarti secara otomatis sistem pendidikan di Indonesia dapat diintegrasikan, malah eksistensi dan peran madrasah yang banyak menyumbang ke arah pencerdasan anak bangsa dalam sejarah perkembangannya muncul di internal umat Islam sendiri dengan dua corak yang saling tarik menarik akibat pola kebijakan pendidikan pemerintah dualistik. Pertama, apakah madrasah tetap mempertahankan fungsinya sebagai lembaga tradisional yang mendorong madrasah untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi tradisionalnya sebagai penjaga dan pemelihara tradisi-tradisi Islam dan sebagai sumber reproduksi otoritas keislaman di lingkungan masyarakat Muslim Indonesia, atau mengakomodir kepentingan pemerintah yang lebih bersifat sentralistik.¹⁶

15 Lihat Suyatno, *Integrasi Ilmu dan Implikasinya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 3

16 Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, hlm. 150-151

Begitu pula dalam perjalanannya hingga kini, di tingkat implementasi ternyata telah menjadikan madrasah mengalami krisis identitas. Segala produk peraturan Pemerintah telah mengaburkan karakter dasar madrasah sekaligus tidak cukup untuk mengidentifikasi madrasah sebagai institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, cukup sulit melahirkan peserta didik madrasah yang sesuai dengan idealisasi Pemerintah. Jika ditelisik lagi, ketertinggalan madrasah lebih disebabkan kegagalan pemerintah mengimplementasikan produk peraturannya sampai ke tingkat budaya, sehingga peraturan tersebut tidak mempunyai pengikat integrasi secara budaya. Selama ini pemerintah 'setengah hati' menindaklanjuti produk hukumnya. Di samping itu pemerintah juga masih sukar menemukan formula ideal pembinaan antara madrasah (di bawah naungan Kementerian Agama) dan sekolah umum (di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Sedangkan di tingkat akar rumput, civitas madrasah merasakan bahwa pemerintah telah cukup lama bersikap diskriminatif terhadap madrasah.¹⁷ Kementerian Agama sering kesulitan menyikapi keluhan masyarakat yang di satu sisi masih menginginkan pembelajaran model madrasah, namun di sisi lain dihadapkan pada kondisi madrasah yang memprihatinkan. Kata 'diskriminasi' yang dipakai civitas madrasah salah satunya dipicu oleh alokasi anggaran yang tidak proporsional antara madrasah dan sekolah umum.

Realitasnya berbagai produk hukum terkait madrasah belum sepenuhnya disepakati. Akibatnya, konsolidasi pemerintah dalam menyikapi persoalan madrasah kurang proporsional dibanding penyikapannya terhadap permasalahan sekolah umum. Sampai saat ini, perhatian pemerintah terhadap madrasah masih sebatas di tingkat pusat, tidak di pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Hal ini tidak terjadi pada sekolah umum yang mendapatkan perhatian dari pemerintah di semua tingkatan. Akibatnya, alokasi dana untuk madrasah jauh lebih kecil dibanding alokasi dana untuk sekolah umum. Seiring dengan semangat reformasi, pemerintah dituntut keseriusannya untuk menghilangkan kesan diskriminasi tersebut. Tanpa menafikan madrasah-madrasah unggulan yang sudah muncul dewasa ini dengan semangat kemandiriannya, pemerintah perlu melakukan aksi lebih besar lagi dalam mempercepat perbaikan kondisi madrasah -terutama yang swasta.

Kebanyakan madrasah, terutama swasta, mengalami kesukaraan dalam prasarana dan sarana, keterbatasan jumlah tenaga kependidikan dan kemampuan yang kurang memadai dalam memberikan imbalan kepada tenaga kependidikannya.

17 Mayoritas madrasah didirikan oleh Pondok Pesantren, dimana salah satu ciri utama pesantren adalah independensi, tidak pernah bergantung dengan pihak di luar dirinya, termasuk pemerintah.

Dari sini muncul kecenderungan pragmatisme dalam penugasan guru mata pelajaran dan tenaga kependidikan lain. Banyak tenaga pendidikan yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan bidang keahlian dan pengalamannya di dunia pendidikan. Akibatnya, mutu pendidikan madrasah makin tertinggal. Dalam kondisi demikian, kesiapan dan kelayakan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan tampaknya patut dipertanyakan akibat adanya dikotomi di atas.¹⁸

Abdul Rachman Shaleh menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pendidikan di Kementerian Agama dianggap sebagai sumber terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia.¹⁹ Hal tersebut disadari sebagai akibat politik pendidikan di masa penjajahan Belanda yang mendikotomikan antara sistem pendidikan Barat yang bersifat umum dan sekular dengan pendidikan Agama yang eksklusif dan bersifat ukhrawi. Perundang-undangan tentang sistem pendidikan jelas memberi peluang terjadinya dualisme pendidikan. Pasal 10 ayat (2) undang-undang No. 4 tahun 1954 menyatakan bahwa "belajar di sekolah agama yang mendapat pengakuan dari kementerian agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar". Demikian pula sebagaimana yang tertulis dalam substansi Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pelaksanaannya juga memberikan pengakuan dan keberadaan madrasah dan pendidikan keagamaan sebagai bagian dalam kesatuan sistem pendidikan nasional.

Kebijakan dan politik pendidikan nasional yang dijalankan pada awal kemerdekaan adalah melalui usaha dengan melanjutkan persekolahan yang ada, walaupun sistem persekolahan tersebut dimaksudkan agar memberi kesempatan belajar kepada semua golongan masyarakat tapi sistem persekolahan tersebut belum berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini dapat dilihat bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia sejak awal mewarisi sistem pendidikan yang dilaksanakan pada zaman kolonial dalam bentuknya sebagai sekolah umum. Demikian pula apabila kita meninjau kembali terhadap perkembangan kelembagaan pendidikan Islam, maka madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga pendidikan umat Islam Indonesia seperti dayah, surau, rangkang dan pondok pesantren yang telah tumbuh sejak abad ke-13

Dengan demikian memang secara ideologis diciptakan adanya dualisme pendidikan, yaitu sekolah umum yang memperoleh sokongan pemerintah dan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan madrasah, pondok pesantren, sekolah yang kurang mendapat perhatian dan menjadi tanggung

18 Baca Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 203

19 Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

jawab Kementerian Agama. Kondisi demikian pada akhirnya pemerintah terlibat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengembangkan beberapa madrasah menjadi madrasah negeri. Alasannya ialah karena situasi dan kondisi sosio-kultural-politik sudah berubah. Kalau kekuatan sosio politik pada awal kemerdekaan terbelah tajam secara ideologis menjadi nasionalis sekuler dan nasionalis Islam yang keduanya terlibat dalam pergumulan politik ideologis sedemikian keras, maka sekarang sudah berubah.²⁰ Kalau para tokoh nasionalis Islam di awal kemerdekaan memperjuangkan masuknya pendidikan Islam (keagamaan) dalam pengelolaan Kementerian Agama merupakan keharusan sejarah (dilaruri), maka tidak demikian halnya di waktu sekarang.

Dari sini dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan nasional Indonesia dewasa ini menunjukkan adanya kecenderungan, setidaknya untuk meminimalisir dampak dan implikasi pemikiran dualisme terhadap sistem pendidikan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya untuk melakukan integrasi institusi pendidikan umum dan agama. Segala konsekuensi yang dapat timbul dari hal tersebut, termasuk mengenai keberlanjutan eksistensi dualisme dalam pemikiran dan praktek pendidikan Indonesia di tengah-tengah upaya tersebut, masih menyediakan ruang terbuka bagi perdebatan-perdebatan selanjutnya.

Solusi Keilmuan: Dekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam

Dikotomi antara ilmu agama dan ilmu non-agama (baca: spesialisasi ilmu atau klasifikasi ilmu) sebenarnya bukan hal yang baru. Islam telah mempunyai tradisi dikotomi ini lebih dari seribu tahun silam. Tetapi dikotomi tersebut tidak menimbulkan terlalu banyak problem dalam sistem pendidikan Islam, sehingga sistem pendidikan sekuler Barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme. Hal ini terjadi karena sekalipun dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu non-agama telah dikenal dalam karya-karya klasik seperti yang ditulis oleh al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, mereka tidak mengingkari tetapi mengakui validitas dan status ilmiah masing-masing kelompok keilmuan tersebut.²¹

Berbeda dengan dikotomi yang dikenal oleh dunia Islam, sains modern Barat sering menganggap rendah status keilmuan ilmu-ilmu agama. Ketika berbicara tentang ilmu-ilmu goib, ilmu agama tidak bisa dipandang ilmiah karena sebuah ilmu bisa dipandang ilmiah apabila objek-objeknya bersifat empiris. Padahal ilmu-ilmu agama tentunya tidak bisa menghindari dari membicarakan hal-hal yang goib.

20 Achmadi, dalam Muntholi'ah, Abdul Rahman, dan M. Rizka Chamami (Editor), *Guru Besar Bicara Mengembangkan...*, hlm. 123

21 Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu* (Jakarta : Mizan, 2005), hlm. 19

Ketika ilmu-ilmu sekuler *positivistik* tersebut diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme Barat, terjadilah dikotomi yang sangat ketat antara ilmu-ilmu agama, sebagaimana yang dipertahankan dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional (pesantren) di satu pihak dan ilmu-ilmu sekuler sebagaimana diajarkan di sekolah-sekolah umum yang disponsori oleh pemerintah di pihak lain. Dikotomi ini menjadi sangat tajam karena telah terjadi pengingkaran terhadap validitas dan status ilmiah yang satu atas yang lain. Pihak kaum tradisional menganggap bahwa ilmu-ilmu umum itu bid'ah dan haram dipelajari karena berasal dari orang-orang kafir sementara pendukung ilmu-ilmu umum menganggap ilmu-ilmu umum sebagai *pseudoilmiah* atau hanya sebagai mitologi yang tidak akan sampai pada tingkat ilmiah karena tidak berbicara tentang fakta tetapi tentang makna yang tidak bersifat empiris. Pada saat ini justru dikotomi seperti inilah yang terjadi dan telah menimbulkan berbagai problem yang akut dalam sistem pendidikan Islam.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dua model lembaga pendidikan formal di Indonesia. Model yang pertama adalah sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Model yang kedua yaitu sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah agama seperti MI, MTs dan MA. Model yang kedua inilah yang dalam sistem pendidikan nasional merupakan wujud dari lembaga pendidikan Islam. Di sekolah agama memiliki komposisi kurikulum 30 persen mata pelajaran agama sedangkan selebihnya 70 persen mata pelajaran umum.²²

Prosentase tersebut membuktikan adanya pemisahan secara substansial antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Akibatnya banyak mata pelajaran yang pada hakekatnya mempelajari ayat-ayat Tuhan akan tetapi sama sekali terputus dengan kebesaran Tuhan. Sebagai contoh, mata pelajaran Sains yang notabeneanya adalah membicarakan tentang alam, dengan kata lain membicarakan tentang ayat-ayat kauniyah Tuhan, tetapi pelajaran tersebut jarang sekali memperkenalkan kebesaran Tuhan.

Soeroyo, sebagaimana yang dikutip oleh Muslih Usa menambahkan bahwa: "Ayat-ayat Tuhan ada dua macam, yakni, pertama, ayat kauniyah yaitu ayat yang tertulis dalam kitab suci. Kedua adalah ayat kauniyah yaitu ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis berupa alam seisinya yang ada di sekeliling kita. Antara keduanya mustahil terjadi perbedaan apalagi pertentangan. Ilmu pengetahuan sebagai rumus keajaiban alam semesta juga mustahil bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau Islam bersumber dari Al-Qur'an untuk kepentingan umat manusia dan alam juga untuk

²² Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 64

umat, maka apa yang terdapat dalam alam semesta dengan perubahannya harus dapat diterangi oleh pelita wahyu yang tertulis.²³

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa sebenarnya Islam tidak mengenal adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama karena keduanya sama-sama sebagai ayat Tuhan.

Syafi'i Ma'arif yang dikutip oleh Muslih Usa dan Aden Wijaya menambahkan: "Pendidikan Islam sekarang menganut sistem pendidikan warisan abad pertengahan bagian akhir. Ciri utama dari warisan tersebut adalah adanya pemisahan secara jelas antara ilmu pengetahuan yang terklasifikasikan (agama dan umum). Sedangkan kedudukan pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional merupakan sisi lain yang bersumber dari sistem penyelenggaraan negara yang sesungguhnya juga sebagai bentuk modifikasi yang tidak sempurna atas warisan sejarah masa lalu tentang pendidikan modern yang kita anut. Sebagai akibatnya gejala ini sedikit banyak telah mempengaruhi kemajuan pendidikan khususnya pendidikan Islam."²⁴

Kondisi seperti ini tentunya menyebabkan pendidikan Islam mengalami kerugian, karena yang dihasilkan oleh model-model sekolah tersebut adalah manusia yang tertinggal oleh kemajuan IPTEK di satu sisi dan di sisi lain juga tertinggal dalam pengetahuan agama. Tertinggal dalam bidang IPTEK dikarenakan tidak seluruh waktu dan potensinya digunakan untuk mempelajari IPTEK akibat kurikulum yang harus dijalani. Tertinggal dalam bidang agama dikarenakan kurikulum yang ada hanya terdapat sedikit pelajaran agama, itupun materinya sudah terjauhkan dari nilai-nilai tauhid. Hal itu menyebabkan usaha untuk mengubah atau membentuk sosok pribadi muslim sesuai yang diidamkan oleh pendidikan Islam sangat kecil.

Adanya dua kutub model pendidikan yakni pendidikan Islam di satu sisi dan pendidikan umum di sisi lain, menurut hemat penulis, sama-sama tidak beresnya. Pada satu sisi sistem pendidikan Islam, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai Perguruan Tinggi Islam sangat tertinggal sehingga para alumni tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, atau dengan kata lain, para lulusannya teralienasi dari kehidupan masyarakat karena ilmu yang dipelajari tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁵ Pada sisi lain, pendidikan umum yang dilaksanakan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum telah berkembang tanpa menyentuh sama sekali nilai-nilai Islam. Hasilnya pun tidak kalah tragis dengan model pendidikan yang dijelaskan sebelumnya, karena sains dan teknologi yang dikembangkan cenderung merusak dan menyebabkan adanya dehumanisasi.

23 Muslih Usa, *Pendidikan di Indonesia antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991), hlm. 44.

24 Muslih Usa dan Aden Wijaya, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial* (Yogyakarta: Aditia Media, 1987), hlm. 64

25 *Ibid.*, hlm. 64

Dalam pandangan Islam, ilmu sudah terkandung secara esensial dalam al-Qur'an. Beragama berarti berilmu dan berilmu berarti beragama. Karena itu, tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama.²⁶ Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan manusia sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan pribadi yang utuh, yang memungkinkan manusia memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kemaslahatan manusia dan untuk menciptakan keadilan, kemajuan, dan keteraturan dunia. Al-Qur'an menyuruh manusia mempelajari kejadian-kejadian yang ada pada diri mereka sendiri, alam semesta dan sejarah umat manusia di muka bumi dengan cermat dan mendalam serta mengambil pelajaran darinya agar dapat menggunakan pengetahuannya dengan tepat.²⁷

Paradigma ilmu meliputi berbagai kesadaran, pertama, ilmu itu secara esensial terkandung dalam ajaran Islam. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu senantiasa bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Maka dalam pandangan Islam, ilmu itu tidak bebas nilai, tapi bebas dinilai. Kedua, Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu dan agama.²⁸ Keduanya tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan dalam setiap posisi dan perannya. Kebenaran ilmu bersifat empirik dan relatif. Ketiga, ilmu itu diciptakan manusia. Hanya saja, sejak awal penciptaannya, pengembangan dan pengamalan ilmu sudah diniatkan untuk mengabdikan kepada Allah Swt. Maka pengamalan ilmu dalam Islam dilihat dari dua dimensi materi dan pelakunya.²⁹

Sebagai upaya mengatasi problem dikotomi keilmuan, penulis sepakat dengan metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yakni dengan cara, mengembangkan ilmuwan-ilmuwan muslim daripada islamisasi ilmu pengetahuan. Cara ini dilakukan dengan memilih ahli-ahli Islam muda yang potensial dengan mengajarkannya kepada mereka metodologi Barat modern. Cara ini dimungkinkan akan efektif untuk mencetak sumber daya manusia muslim yang handal. Atau dengan solusi yang kedua, yakni anak-anak muda yang menguasai metodologi modern Barat kemudian digembleng dengan nilai-nilai Islam.

Upaya Kelembagaan: Wacana Pendidikan Satu Atap

Pengelolaan pendidikan di Indonesia di bawah dua payung Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dipaparkan di atas telah banyak menimbulkan kerugian, terlebih pada lembaga pendidikan

26 *Ibid.*, hlm. 44

27 Fazlur Rahman, *The Qur'anic Solution Of Pakistan's Education Problem*, dalam *Islam Studies* 6, 4, 1967) hlm. 315-326

28 Baca Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu* (Jakarta : Mizan, 2005), hlm. 19

29 Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam...*, hlm. 219-220

Islam. Dengan adanya pengelolaan pendidikan di dua kementerian, menimbulkan berbagai persoalan sebagai berikut:

Pertama, adanya pereduksian terhadap makna pendidikan Islam.³⁰ Pendidikan Islam hanya dimaknai sebagai pendidikan yang terdiri dari lima mata pelajaran yang ada di sekolah yakni al-Qur'an, Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam,

Kedua, pendidikan merupakan investasi peradaban. Pertanyaannya adalah mungkinkah peradaban dibangun hanya dengan pendidikan agama dalam bentuk lima mata pelajaran tersebut? Dalam sejarah islam, peradaban Islam mengalami kemajuan dan perkembangan pada abad VII sampai XIII disebabkan orang-orang muslim tidak memisahkan antara "ilmu-ilmu agama" dengan "ilmu-ilmu umum". Kedua rumpun ilmu tersebut merupakan bagian yang integral dari keilmuan islam. akibatnya, kedua rumpun ilmu tersebut mengalami perkembangan dan kemajuan secara selaras, seimbang dan saling melengkapi dan pada akhirnya membentuk sebuah peradaban yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam bahasa Iqbal, peradaban semacam ini adalah peradaban yang dibangun atas dua kekuatan, yakni kekuatan cinta ('isyq) yang menjadi karakter bangsa timur dan kekuatan penalaran (*zaraqi*) yang menjadi karakter bangsa Barat.³¹

Ketiga, pendidikan Islam saat ini hanya dianggap sebagai subsistem (pelengkap), bukan sebagai komponen utama dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini tidak member apresiasi yang sepatutnya kepada pendidikan Islam karena hanya dianggap sebagai pelengkap saja.

Keempat, secara kelembagaan, Kementerian Agama bukanlah sebuah lembaga yang memiliki wewenang dan otoritas dalam dunia pendidikan. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama tidak memiliki substansi yang jelas, bahkan hanya terkesan mengekor pada kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, bagaimana mungkin pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama akan maju, yang terjadi adalah selalu ketinggalan dengan pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

30 M. Agus Nuryatno, Bahan Kuliah, Program Doktor Kependidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

31 Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, terj. Ali Audah, Taufik Ismail dan Gunawan (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hlm. xii

Kelima, beberapa dekade terakhir ini, banyak lembaga di bawah kementerian agama baik STAIN maupun IAIN berubah menjadi UIN. Yang paling kentara dari efek konversi tersebut adalah dibukanya jurusan-jurusan yang selama ini dikenal dengan ilmu umum, semisal fakultas sains dan teknologi, fakultas ilmu sosial dan humaniora, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas kedokteran dan lain-lain. Selama ini fakultas-fakultas tersebut berada di bawah naungan kementerian pendidikan dan Kebudayaan, sehingga secara kelembagaan UIN itu berada di bawah dua kaki yakni kementerian pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian agama. Hal ini tentu mengundang banyak masalah, baik mengenai persoalan epistemology keilmuan maupun pengembangan kelembagaan.

Oleh karena itu, sistem dualisme itu harus segera dibenahi. Namun demikian, upaya tersebut memerlukan pikiran jernih, sebagaimana yang dipaparkan oleh Achmadi, dengan menghilangkan kegamangan dari para elit muslim dan menanggalkan beban politis ideologis masa lalu dan fokus pada pertimbangan pedagogis dan akademis. Pengelolaan pendidikan Islam yang selama ini di bawah payung Kementerian Agama diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pertimbangan sebagai berikut:³²

Pertama, situasi dan kondisi sosio-kultural-politik sudah berubah. Jika kekuatan sosio-politik pada awal kemerdekaan terbelah tajam secara ideologis antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islam maka kondisi sekarang telah berubah.

Kedua, semakin berkembangnya zaman, proses pengelolaan lembaga pendidikan dituntut menggunakan prinsip efektifitas, efisiensi, dan fungsional sebagai kunci keberhasilan manajemen. Oleh karena itu penyerahan otoritas pengelolaan pendidikan Islam ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dianggap sesuai dengan prinsip tersebut.

Ketiga, secara politis pengembangan keilmuan akan optimal ketika bebas dari tekanan berbagai kepentingan lain terutama politik. Kehidupan modern mengenal adanya bermacam-macam institusi seperti politik, ekonomi, budaya, agama, dan pendidikan. Masing-masing memiliki wilayah garapan dan penataan-penataan sendiri. Lembaga pendidikan sebagai pranata ilmu pengetahuan harus terlepas dari tekanan institusi lain.

Keempat, wilayah pendidikan yang selama ini dikelola oleh Kementerian Agama sudah demikian luas, tidak hanya pendidikan agama dan keagamaan tetapi mencakup hampir semua bidang ilmu pengetahuan, sehingga terlalu berat menanggung beban.

32 *Ibid.*, 123-126

Kelima, dengan diserahkannya pengelolaan pendidikan Islam ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setidaknya telah menghilangkan pendidikan dikotomik terutama dari sisi kelembagaan.

Keenam, untuk menjaga agar pendidikan agama tetap konsisten dengan tujuan dan fungsinya yakni meningkatkan iman, takwa, dan aklaqul karimah peserta didik melalui pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya, maka UU Sisdiknas yang memuat secara eksplisit masalah tersebut, harus dikawal secara ketat oleh semua kekuatan sosial politik yang peduli terhadap permasalahan ini.

Simpulan

Dualisme sistem pendidikan di Indonesia memiliki akar historis yang panjang. Jika ditilik dari akar sejarahnya, dualisme disebabkan karena adanya dikotomi keilmuan yakni antara ilmu umum dan ilmu agama. Adanya dikotomi antara kedua rumpun keilmuan tersebut bukan berasal dari Islam itu sendiri melainkan warisan kolonialisme.

Dikotomi yang mewujud menjadi dualisme sistem pendidikan yakni pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan telah menyebabkan berbagai macam persoalan baik persoalan epistemologi maupun persoalan kelembagaan. Mulai dari adanya reduksi terhadap makna pendidikan Islam, hingga posisi dilematis lembaga-lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, dualisme sistem pendidikan di Indonesia perlu segera didekonstruksi. Namun demikian, dekonstruksi dualism sistem tersebut harus didasari oleh pikiran yang jernih dan pertimbangan yang matang dan menuntut peran serta berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan. Pada akhirnya nanti semua lembaga pendidikan berada di bawah satu payung kementerian yakni Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan yang secara *de facto* dan *de jure* memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengembangkan pendidikan.

Rujukan

- Achmadi, dalam Muntholi'ah, Abdul Rahman, dan M. Rizka Chamami (Editor), *Guru Besar Bicara Mengembangkan Keilmuan Pendidikan Islam*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2010.
- Agus Nuryatno, M, Bahan Kuliah, Program Doktor Kependidikan Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Abdullah, Amin, *Menyatukan kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum*, Yogyakarta: SukaPress IAIN Sunan Kalijaga. 2003.
- Azra, Azyumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002.
- A Steenbrink, Karel, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES The Columbia Encyclopedia (1963) NY & London: Colombia University Press. 1986.
- Hashim, Rosnani, *Educational dualisme in Malaysia: Implication for Theory and Practice*. Oxford University Press. 1996.
- Iqbal, Muhammad, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, terj. Ali Audah, Taufik Ismail dan Gunawan, Yogyakarta: Jalasutra, 2008.
- Kholid Fathoni, Muhammad, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Kartanegara, Mulyadhi, *Integrasi Ilmu*, Jakarta : Mizan, 2005.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos. 1999.
- Muarif, *Liberalisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008.
- Rahman, Fazlur, *The Qur'anic Solution Of Pakistan's Education Problem*, dalam *Islam Studies* 6, 4, 1967.
- Rachman Shaleh, Abdul, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sutrisno, Fazlur Rahman *Kajian Terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Suyatno, *Integrasi Ilmu dan Implikasinya Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*, (Tesis) Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Usa, Muslih dan Wijaya, Aden, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditia Media, 1987.

Usa, Muslih, *Pendidikan di Indonesia antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidayakarya Agung, 1979.

Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1985.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL PENDIDIKAN ISLAM (JPI) FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Naskah-naskah yang dikirimkan ke redaksi Jurnal Pendidikan Islam (JPI) akan dipertimbangkan pemuatannya apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat ilmiah, berupa kajian dan pengembangan pendidikan Islam, gagasan orisinal, ringkasan hasil penelitian/survei, atau bentuk tulisan lainnya yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan studi dan pemikiran pendidikan Islam
2. Naskah yang dikirim merupakan naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan apapun atau tidak sedang diminta penerbitannya oleh media lain.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing (Inggris/Arab) yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia atau asing (Inggris/Arab) yang baik dan benar.
4. Setiap naskah ditulis secara berurutan terdiri dari judul, nama penulis, identitas penulis (lembaga dan e-mail penulis), abstrak, kata kunci, isi, dan rujukan.
5. Judul harus ringkas, spesifik dan efektif, tidak melebihi 12 kata yang menggunakan Bahasa Indonesia, 10 kata yang menggunakan Bahasa Inggris.
6. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab atau Inggris. Abstrak ditulis antara 100-150 kata dengan memuat latar belakang masalah, tujuan, dan kesimpulan.
7. Kata kunci maksimal 4 kata yang mencerminkan isi naskah.
8. Isi naskah terdiri dari 5000 s.d. 6000 kata atau 20 s.d. 25 halaman kertas ukuran kuarto diketik dengan spasi satu setengah.
9. Naskah ditulis dengan menggunakan *footnote* (catatan kaki) yang memuat nama penulis, judul buku/majalah/jurnal diketik miring, kota tempat penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan, dan halaman.
10. Rujukan disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis, judul buku/jurnal/majalah diketik miring, kota tempat penerbitan, nama penerbit dan tahun terbit.
11. Naskah diketik dalam bentuk Microsoft Word dengan format RTF (Rich Text Format) atau Doc. (Word Document) dikirim langsung ke redaksi atau melalui e-mail: jurnaljpi@yahoo.co.id dengan menggunakan *attachment file*.

12. Tidak keberatan jika naskah yang dikirim mengalami penyuntingan atau perbaikan tanpa mengubah isinya.
13. Setiap naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan dalam tiga kriteria: diterima tanpa revisi, diterima dengan revisi, atau ditolak.
14. Naskah yang dimuat akan diberitahukan kepada penulis via e-mail.
15. Naskah yang dimuat akan diberi apresiasi dan mendapatkan *Jurnal Pendidikan Islam*.

Jurnal Pendidikan Islam (JPI)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Lt. III Ruang 315

UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Indonesia

Telp. +62-274-513056

E-mail: jurnaljpi@yahoo.co.id